

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Asep Setiawan, S. Y. (2022). *Dinamika Demokrasi, Pemilu dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Leutika Prio.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Amalia, Luky Sandra. (2021). *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: LIPI Press.

Arifin, M. R., Salmah, N., Hau, A. A. P. D., Lestari, N. P. I. J., & Naali, S. (2023). *Buku Panduan Pemilu 2024: Untuk Pemilih Disabilitas*. Universitas Bakrie Press.

Aris, M. S. (2021). *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. Setara Press Kelompok Intrans Publishing.

Dian Husri Hurasan, M. A. (2022). *Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Perspektif*, 215.

Ekawati, E. (2019). *Peta Sosial Politik Pemilu Serentak Survei Pandangan Ahli*. Jakarta: LIPI Press.

Handayani, R. S. (2020). *Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan umum Tahun 2019 di Indonesia. Perspektif*, 12.

Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.

James P. 2016. *Participant Observation*. Long Grove: Waveland Press.

Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2021. *Pemilihan Umum Untuk Indonesia, Sebush Literasi Politik Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi

Kebijakan.

Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.

Pramono, Sidik. 2017. *Inovasi Pemilu, Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Salampessy, M., Abqa, M. A. R., Zukriadi, D., Yustrisia, L., Suhariyanto, D., Riyanda, R., ... & Farda, N. F. (2023). *Penegakan Hukum Pemilu*. Cv. Gita Lentera.

Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika.

Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., & Suhariyanto, D. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

Sinaga, P. (2018). *Pemilihan Kepala Daerah dalam Kontruksi UUD NRI 1945*. Binamulia hukum, 19.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Spradley.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., ... & Abas, M. (2023). *Politik hukum pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nurhasim, M. (2020). *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. Airlangga University Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.

Antari, P. E. D., Abhiseka, I. G. D. (2024). Penindakan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025.

- Ardipandanto, A. (2022). Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang : perspektif profesionalisme KPU. Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara. *Politica*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2020.
- Dian Husri Hurasan, M. A. (2022). Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan. *Perspektif*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2021
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022..
- Firdaus, A. (2020). Money politics dalam pemilihan umum oleh badan pengawasan pemilihan umum: pengawasan tindak pidana pemilu. *jurnal justika*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Handayani, R. S. (2020). Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan umum Tahun 2019 di Indonesia. *Perspektif*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020.
- Heryansyah, D. (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2 Tahun 2022.
- Huda, H. D., Winarto, A. E., & Lestariningsih, L. (2022). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. *BRILIANT: Jurnal Riset Dan Konseptual*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022.
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani legal review*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.
- Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.
- Lalu Sopan Tirta Kusuma, Z. J. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilihan umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat) . *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 23 No. 2 Tahun 2019.
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan umum Indonesia. *Jurnal Rechtsvindong*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014.
- Pardede, M. (2018). Legitimasi pemilihan kepala/wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan otonomi daerah. *Jurnal penelitian hukum De Jure*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2018.

- Perdana, P. A. (2018). Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan Dan Kebumen Tahun 2015: Studi Kasus TPS 1 DAN TPS 2 Timbangsari Lebakbarang Pekalongan Dan TPS 10 Gemeksekti Kebumen. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2018.
- Putri Ramadhanti Anton Taha, M. R. (2024). Faktor Penghambat Penanganan Pelanggaran Praktik Politik Uang Oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan umum Tahun 2019. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2024.
- Sastera, I. G. B. Y., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.
- Surahman, S., Supriyadi, S., Purnamasari, A. I., Rampadio, H., & Muja'hidah, M. H. (2023). Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Usm Law Review*, Vol.6 No. 3 Tahun 2023.
- Ukkasah, S. A., Nanti, M. A., & Savero, G. (2024). Efektivitas Panwaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2024.
- Wulandari, I. A. S., Rideng, I. W., & Suryani, L. P. (2023). Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2023.
- Zefanya, K. (2024). Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol. 2 No. 11 Tahun 2024.

ARTIKEL ELEKTRONIK

- Bawaslu Prov. Riau. (2021, Oktober). Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana Pemilu & Pemilihan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 & Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Beserta Perubahannya). Tersedia Pada <https://riau.bawaslu.go.id/wpcontent/uploads/2021/10/KOMPILASITINDAK-PIDANA-PEMILU-DAN-PEMILIHAN..pdf> Diakses pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 01.00 wita.
- Hukum online.com. (2023, November). 9 Jenis Tindak Pidana Pemilu. Tersedia Pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu/lt5bc40aaec6160/> Diakses pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 09.00 wita.

Hukum online.com. (2024, Januari). Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, Sangketa Pemilu. Tersedia Pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pelanggaran-administratifpemilu-pidana-pemilu-dan-sengketa-pemilu-lt65b248d363d2e/>
Diakses pada tanggal 3 Juli 2025 pukul 11.00 wita.

Sip Law Firm. (2024, Januari). Jenis dan Ancaman Pidana Pelanggaran Pemilu. Tersedia Pada <https://siplawfirm.id/pelanggaran-pemilu/?lang=id>
Diakses pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 10.00 wita.

SUMBER SKRIPSI

Al-Najjar, Nashat (2024). Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Juneidi, I. (2021). Evaluasi Kinerja Bawaslu Dalam Pembentukan Desa Anti Politik uang Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Bantul. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hidayatullah, R. (2021). Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pilkada Kabupaten Tangerang Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018). Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Amandemen. Jakarta. (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).